

**KOORDINASI HORIZONTAL KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN
DESA (TMMD) DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA**

Oleh :

Mandrawan Suseno

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak,
e-mail : mandrawan.suseno@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh proses manajemen TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara belum terlaksana secara optimal, terutama dalam pelaksanaan koordinasi antara Kodim 1207/Ptk dengan unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan TMMD. Berdasarkan fakta tersebut, tulisan ini difokuskan pada koordinasi horizontal kegiatan TMMD di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara dengan aspek koordinasi pada Tahap Perencanaan, Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Purna Manunggal kegiatan TMMD. Tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi horizontal dalam kegiatan TMMD di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi dalam Tahap Perencanaan sudah dilakukan oleh unsur-unsur pimpinan yang terlibat dalam kegiatan TMMD, namun belum ditindaklanjuti melalui koordinasi secara teknis antar staf yang berkaitan dengan dukungan anggaran dan penentuan sasaran TMMD. Koordinasi dalam Tahap Persiapan khususnya dalam penyiapan administrasi sudah dilakukan oleh Kodim 1207/Ptk dengan unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan TMMD, namun koordinasi dalam penyiapan personel untuk mendukung kegiatan TMMD belum dilaksanakan secara optimal. Adapun koordinasi dalam Tahap Pelaksanaan TMMD antara Komandan SSK TMMD dengan Lurah, RW dan RT di Kelurahan Bangka Belitung Darat belum dilakukan secara optimal khususnya dalam penggerakan masyarakat. Koordinasi dalam Tahap Purna Manunggal TMMD antara Kodim 1207/Ptk dengan Pemerintah Kota Pontianak belum berjalan secara terpadu dan berkesinambungan terutama dalam kegiatan pemeliharaan hasil TMMD.

Kata Kunci : Koordinasi Horizontal, Tahap Perencanaan TMMD, Tahap Persiapan TMMD, Tahap Pelaksanaan TMMD dan Tahap Purna Manunggal TMMD

Abstract

This paper is motivated by the TNI Manunggal Village Building Management (TMMD) in the Village of Inland Pacific Islands Southeast Pontianak district has not implemented optimally, especially in the implementation of coordination between the District Military Command 1207/Ptk with the elements involved in activities TMMD. Based on these facts, this paper focuses on horizontal coordination of military activities TMMD in Bangka Belitung Aquatic Village District East Pontianak with aspects of coordination in Phase Planning, Preparation Phase, Implementation Phase and Phase Full Manunggal TMMD activities. The goal is to determine the horizontal coordination in the implementation of activities in the Village TMMD Pacific Islands Southeast Land District of Pontianak. The type of study is a qualitative research method deskriptif. The results showed that coordination in the planning stage has been carried out by elements of the leadership involved in activities TMMD, but has not followed through technical coordination between staff, with regard to budget support and targeting TMMD. Coordination in Preparation stage, especially in the administrative preparation has been done by the District Military Command 1207/Ptk the elements involved in activities TMMD, but coordination in the preparation of personnel to support TMMD not implemented optimally. Coordination in the Implementation Phase TMMD between Commander SSK TMMD with Headman, RW and RT in the Village of Bangka Belitung Army is not optimal, especially in community mobilization. Coordination in Phase Full Manunggal TMMD between the District Military Command 1207/Ptk Pontianak City Government has not run in an integrated and sustainable especially in maintenance activities TMMD results.

Keywords: Horizontal Coordination, Planning Phase TMMD, Preparation Phase TMMD, Implementation Phase TMMD and phase complete cohesiveness TMMD

PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sebagai bagian dari TNI mempunyai tugas pokok antara lain melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta (Markas Besar TNI, 2007:31). Tugas pokok ini dilaksanakan oleh TNI AD melalui Pembinaan Teritorial oleh setiap prajurit TNI AD secara individu selaku insan teritorial maupun dalam hubungan satuan oleh satuan-satuan yang ada di jajaran TNI AD.

Pembinaan Teritorial pada hakekatnya merupakan kegiatan dalam menyiapkan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta serta upaya untuk membangun, memelihara dan memantapkan kemandirian TNI-Rakyat, melalui kegiatan bantuan untuk mengatasi kesulitan rakyat.

Metode yang digunakan oleh TNI AD dalam melakukan Pembinaan Teritorial adalah melalui kegiatan Bhakti TNI, Komunikasi Sosial dan Pembinaan Ketahanan Wilayah. Salah satu kegiatan Bhakti TNI adalah dengan melaksanakan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), yang merupakan program terpadu, lintas sektoral antara TNI, Polri, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta komponen bangsa lainnya, yang dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat guna meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan khususnya daerah yang tergolong tertinggal/miskin, terisolasi/terpencil, daerah perbatasan/pulau-pulau terluar dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena akibat bencana (Staf Umum Teritorial Angkatan Darat, 2012:3).

Kegiatan TMMD sudah dilaksanakan sejak tahun 1978, yang pada saat itu masih bernama ABRI Masuk Desa (AMD) dan sampai dengan saat ini masih terus berjalan. Program TMMD dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada setiap tahun dan diselenggarakan di setiap Komando Kewilayahan, yang pengorganisasiannya dilaksanakan secara hierarkis dimana Panglima TNI sebagai Penanggung Jawab Umum (PJU), Kasad sebagai Penanggung Jawab Operasional (PJO), Pangdam sebagai Pengendali Kegiatan Operasional (PKO), Danrem sebagai Penanggungjawab Keberhasilan Pelaksanaan (PKP), Dandim sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas), dan Danki sebagai Komandan Satuan Selingkat Kompi (Dan SSK). Program TMMD dilaksanakan setiap tahun dua kali, pada tahun 2012 ini masuk pada program TMMD ke 88 yang dilaksanakan pada bulan Mei 2012 dan TMMD ke 89 yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2012.

Berdasarkan Surat Telegram Rahasia Kasad selaku PJO (2012:1-2), Kodam XIII/1pr mendapat perintah untuk melaksanakan kegiatan TMMD ke 88

secara serentak di tujuh wilayah yaitu di wilayah Kota Pontianak Kalbar dilaksanakan oleh Kodim 1207/Ptk, di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Kalbar dilaksanakan oleh Kodim 1206/Psb, di wilayah Kabupaten Sanggau Kalbar dilaksanakan oleh Kodim 1204/Sgu, di wilayah Kabupaten Landak Kalbar dilaksanakan oleh Kodim 1201/Mph, di wilayah Kabupaten Barito Utara Kalteng dilaksanakan oleh Kodim 1013/Mtw, di wilayah Kabupaten Barito Timur Kalteng dilaksanakan oleh Kodim 1012/Btk dan di wilayah Kabupaten Kapuas Kalteng dilaksanakan oleh Kodim 1011/Klk.

Kegiatan TMMD oleh Kodim 1207/Ptk dilaksanakan di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak telah dilaksanakan selama 21 hari dimulai tanggal 23 Mei s.d 12 Juni 2012, yang dilanjutkan dengan program pemeliharaan hasil TMMD selama satu tahun. Dalam pelaksanaannya melibatkan secara terintegrasi antara personel militer dari Kodim 1207/Ptk dengan personel militer dari satuan TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri yang ada di wilayah Pontianak, unsur-unsur dari Pemerintah Kota Pontianak, Ormas dan masyarakat setempat.

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Tim TMMD ke 88 Kodim 1207/Ptk (2012:1-3), Anggaran untuk mendukung kegiatan TMMD berasal dari APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 400.000.000,00, terdiri dari anggaran operasional sebesar Rp 100.000.000,00 dan anggaran belanja barang sebesar Rp 300.000.000,00.

Menurut Rencana TMMD Kodim 1207/Ptk (2012:3), tujuan dilaksanakannya kegiatan TMMD oleh Kodim 1207/Ptk di Kelurahan Bangka Belitung Darat adalah untuk membantu Pemerintah Kota Pontianak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan baik fisik maupun non fisik, sehingga diharapkan akan tercipta Ruang Juang, Alat Juang dan Kondisi Juang yang tangguh serta Kemandirian TNI-Rakyat dalam rangka menciptakan ketahanan wilayah guna mendukung ketahanan nasional aspek darat. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan TMMD adalah:

1. Sasaran Fisik, terdiri dari:
 - a. Pembangunan rabat beton di Jl. Disbun I Kelurahan Bangka Belitung Darat sepanjang 500 m, lebar 3 m dan tinggi 15 m.
 - b. Perbaikan tempat ibadah Masjid Nurul Iman di Jl. Disbun I Komplek Sejahtera III Kelurahan Bangka Belitung Darat.
2. Sasaran Non Fisik, terdiri dari:
 - a. Penyuluhan Narkoba dan HIV/AIDS.
 - b. Penyuluhan Kesadaran Bela Negara.
 - c. Penyuluhan Bahaya Laten Komunis.
 - d. Penyuluhan Kamtibmas.
 - e. Penyuluhan KB dan Kesehatan.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan kegiatan TMMD di Kelurahan Bangka Belitung Darat

Kecamatan Pontianak Tenggara tidak terlepas dari proses manajemen yang dilaksanakan oleh Kodim 1207/Ptk sebagai *leading sector* dari kegiatan TMMD tersebut. Proses manajemen tersebut dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen antara lain menurut Guliick (dalam Djati Julitriarsa dan John Suprihanto, 2001:6), meliputi : *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting* dan *budgeting* (POSDCORB). Adapun proses manajemen dalam kegiatan TMMD yang dilaksanakan oleh TNI AD sesuai Buku Pedoman Penyelenggaraan TMMD oleh Staf Umum Teritorial Angkatan Darat (2002:9-23) dilaksanakan melalui empat tahapan kegiatan yaitu : Tahap Perencanaan, Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Purna Manunggal. Pada setiap tahapan kegiatan TMMD perlu dilaksanakan koordinasi secara terpadu dan berkesinambungan dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan TMMD.

Permasalahan yang ditemukan oleh peneliti adalah, bahwa proses manajemen TMMD belum terlaksana secara optimal, antara lain dalam pelaksanaan koordinasi antara Kodim 1207/Ptk dengan instansi dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan TMMD, hal ini tercermin pada fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Personel satuan TNI yang dilibatkan dalam kegiatan TMMD seperti dari Denkau-2, Lanal Pontianak dan Lanud Supadio pada umumnya merupakan personel yang baru masuk satuan sehingga belum berpengalaman dalam kegiatan TMMD, hal ini menunjukkan belum adanya sinkronisasi antara Kodim 1207/Ptk dengan satuan TNI lain dalam penyiapan personel TMMD.
2. Personel dari Polri tidak ada yang dilibatkan dalam kegiatan fisik tetapi hanya dilibatkan dalam kegiatan non fisik berupa penyuluhan Kamtibmas, Narkoba dan HIV/AIDS, hal ini menunjukkan belum adanya integrasi dan keterpaduan antara TNI dengan Polri dalam kegiatan TMMD.
3. Kegiatan non fisik khususnya di bidang KB dan Kesehatan masih sebatas penyuluhan belum mengarah pada kegiatan pelayanan, hal ini menunjukkan belum optimalnya sinkronisasi dan komunikasi antara Kodim 1207/Ptk dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) dan Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
4. Anggaran untuk mendukung kegiatan TMMD dari Pemerintah Kota Pontianak dalam lima tahun terakhir tidak mengalami peningkatan dan anggaran TMMD yang dilaksanakan di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak ini terlambat diterima oleh Kodim 1207/Ptk yaitu diterima satu minggu setelah kegiatan TMMD berjalan, hal ini menunjukkan belum optimalnya sinkronisasi dan komunikasi antara Kodim 1207/Ptk dengan Pemerintah Kota Pontianak.

5. Ormas khususnya dari unsur FKPPi dan PPM maupun dari Mahasiswa dan Pelajar tidak ada yang terlibat dalam kegiatan TMMD, hal ini menunjukkan belum adanya komunikasi, sinkronisasi dan integrasi antara Kodim 1207/Ptk dengan FKPPi, PPM, Mahasiswa maupun Pelajar.

6. Jumlah masyarakat yang dilat sertakan dalam mendukung kegiatan fisik masih sangat terbatas, hal ini menunjukkan belum optimalnya komunikasi, sinkronisasi dan integrasi antara Kodim 1207/Ptk dengan Aparat Pemerintah di Kecamatan Pontianak Tenggara dan Kelurahan Bangka Belitung Darat serta Tokoh Masyarakat dan masyarakat yang ada di lokasi TMMD.

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, tulisan ini difokuskan pada "Koordinasi horizontal kegiatan TMMD di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara". Dengan aspek koordinasi pada tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap purna manunggal kegiatan TMMD.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Organisasi/Manajemen

a. Definisi Organisasi

Sebuah organisasi macam apapun baik organisasi pemerintah maupun swasta, seperti organisasi pendidikan, kesehatan, panti asuhan, TNI, Polri tidak dapat dipisahkan dari manajemen. Karena organisasi merupakan wadah dilaksanakannya proses manajemen, atau sebaliknya proses manajemen tidak dapat terakana tanpa adanya suatu organisasi.

Menurut Griffin (dalam Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, 2009:4) Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai kesepakatan tujuan tertentu atau dalam bahasa lain organisasi sebagai sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerja sama.

b. Definisi Manajemen

Beberapa definisi manajemen antara lain menurut Koontz dan O'donnell (dalam Amirullah dan Haris Budiyono, 2004:7), "manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian".

Plunket (2005:5) mendefinisikan manajemen sebagai:

"One or more managers individually and collectively setting and achieving goals by exercising related functions (planning, organizing, staffing, leading and controlling) and coordinating various resources (information, materials, money and people)".

Menurut Terry (dalam Amirullah dan Haris Budiyono, 2004:7) "manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya".

Sedangkan Stoner (dalam Amirullah dan Haris Budiyono, 2004:7) berpendapat bahwa "manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan".

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (t.512), dijelaskan bahwa "manajemen adalah pemanfaatan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksudkan".

Dari beberapa definisi tentang manajemen yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang sistematis, terkoordinasi dan terintegrasi melalui penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

c. Fungsi-fungsi Manajemen

Beberapa ahli manajemen telah mengemukakan tentang proses manajemen ditinjau dari segi fungsi-fungsi manajemen antara lain:

Menurut Fayol (dalam Anton Athoillah, 2010:95), fungsi manajemen meliputi : "planning, organizing, commanding, coordinating dan controlling". Adapun menurut Gullich (dalam Anton Athoillah, 2010:96), fungsi manajemen meliputi "planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting dan budgeting (POSDCORB)". Sedangkan menurut Winardi (dalam Anton Athoillah, 2010:96), fungsi manajemen meliputi : "planning, organizing, coordinating, actuating, leading, communicating dan controlling".

Dari beberapa fungsi manajemen yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi manajemen seolah-olah tidak ada batasan yang jelas namun terlihat saling melengkapi satu sama lain, meliputi :

planning, organizing, coordinating, commanding, actuating, controlling dan budgeting".

2. Teori Koordinasi

a. Definisi Koordinasi

Beberapa definisi koordinasi antara lain menurut D. White (Inu Kencana Syafie, 2006:85), "koordinasi adalah penyesuaian diri (*adjustment*) dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok (*parts in time*), sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak dalam keseluruhan hasil". Dari definisi koordinasi yang telah diuraikan oleh D. White diatas, maka unsur-unsur koordinasi mencakup tentang penyesuaian diri, pengoperasian, waktu yang tepat, sumbangan terbanyak dan hasil yang dicapai.

Adapun menurut Terry (Inu Kencana Syafie, 2006:85-86), "koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronizations*) dari usaha-usaha (*efforts*) untuk menciptakan pengaturan waktu (*timing*) dan memimpin (*directing*), dalam hasil pelaksanaan yang harmonis (*harmonious*) dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan (*stated objective*)". Dengan demikian menurut Terry koordinasi mencakup unsur-unsur tentang sinkronisasi, pengaturan waktu, memimpin, harmonis dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan Mooney (Inu Kencana Syafie, 2006:86) berpendapat bahwa "koordinasi adalah susunan yang teratur (*orderly arrangement*) dari usaha kelompok (*group effort*) untuk menciptakan kesatuan tindakan (*unity of action*) dalam mengejar (*pursuit*) tujuan bersama (*common purpose*)". Dengan demikian koordinasi menurut Mooney mencakup unsur-unsur tentang susunan yang teratur, kesatuan tindakan dan tujuan bersama.

Melihat definisi-definisi koordinasi yang telah diuraikan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha kelompok untuk menciptakan kesatuan tindakan demi kepentingan dan tujuan bersama. Dengan demikian koordinasi mencakup unsur-unsur tentang sinkronisasi yang teratur, kesatuan tindakan, kepentingan bersama dan tujuan bersama.

b. Syarat-syarat Koordinasi

Hasibuan (2011:88) berpendapat bahwa koordinasi harus memenuhi syarat-syarat :

1) *Sence of cooperation*, perasaan untuk bekerjasama, ini harus dilihat dari

sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang.

- 2) *Rivalry*, dalam suatu organisasi-organisasi besar sering diadakan persaingan antar bagian, agar bagian-bagian berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan.
- 3) *Team spirit*, satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai.
- 4) *Esprit de corps*, bagian-bagian yang diikuti sertakan atau dihargai umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat.

Koordinasi tidak dapat diperintah atau dipaksakan, tetapi akan lebih baik dilakukan dengan cara persuasif (permintaan dan permohonan) kepada bawahan dengan mengugah perasaannya, karena dengan cara tersebut akan lebih dihayati dan ditaati oleh bawahan, sebab mereka merasa lebih dihargai dan dihormati (Hasibuan, 2011:88).

c. Sifat-sifat Koordinasi

Hasibuan (2011:87) berpendapat bahwa koordinasi memiliki sifat-sifat sebagai berikut :
" Pertama koordinasi adalah dinamis dinamis bukan statis, kedua koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator (manajer) dalam rangka mencapai sasaran, ketiga koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan".

Hasibuan (2011:87) juga berpendapat bahwa asas koordinasi adalah asas skala (*scalar principle=hierarki*) artinya koordinasi dilakukan menurut jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang-jenjang yang berbeda satu sama lain. Asas herarki ini menekankan bahwa setiap atasan selaku koordinator harus mengkoordinasi bawahan secara langsung.

d. Manfaat Koordinasi

Handoko (2003:197) berpendapat bahwa apabila dalam suatu organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada beberapa manfaat yang akan didapatkan, yaitu :

- 1) Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.
- 2) Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.
- 3) Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antar bagian dalam organisasi.
- 4) Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi.
- 5) Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu.

Hasibuan (2011:88) juga berpendapat bahwa koordinasi penting dalam suatu organisasi, yaitu:

- 1) Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan
- 2) Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
- 4) Supaya semua unsur manajemen (6M) dan pekerjaan masing-masing individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
- 5) Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

e. Tujuan Koordinasi

Menurut Hasibuan (2011:87) tujuan dilakukan koordinasi dalam suatu organisasi adalah :

- 1) Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran kearah tercapainya sasaran organisasi.
- 2) Untuk menjuruskan keterampilan spesialisasi kearah tercapainya sasaran organisasi.
- 3) Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan.
- 4) Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran organisasi.
- 5) Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsur-unsur manajemen (6 M) ke arah sasaran organisasi.
- 6) Untuk menghindari tindakan overlapping dari sasaran organisasi.

f. Tipe Koordinasi

Pada umumnya suatu organisasi akan memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar tujuan dapat tercapai secara optimal. Hasibuan (2011:86-87) berpendapat bahwa tipe koordinasi dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Koordinasi Vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan dan pengarahannya yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegaknya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.

- 2) Koordinasi Horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan dan pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas interdisciplinary dan interrelated. Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan dan menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Sedangkan interrelated adalah koordinasi antar badan (instansi) beserta unit-unit yang fungsi-nya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setara.

g. Cara Mengadakan Koordinasi

Cara-cara mengadakan koordinasi menurut Hasibuan (2011:88) adalah

- 1) Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat, keterangan mengenai pekerjaan saya tidak cukup karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik.
- 2) Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri-sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama.
- 3) Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran dan lain sebagainya.
- 4) Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran.
- 5) Membina human relations yang baik antara sesama karyawan.
- 6) Manajer sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan.

Suatu koordinasi akan lebih baik apabila memperoleh dukungan dari bawahan, dan pihak-pihak terkait yang akan melakukan pekerjaan diikuti sertakan dalam proses pengambilan keputusan, supaya mereka antusias dalam melaksanakannya (Hasibuan, 2011:88-89).

Menurut Manullang (2009:12) *coordinating* atau mengkoordinasikan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga

terdapat kerja sama yang teratur dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan cara memberikan instruksi, perintah, mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat, mengadakan pelatihan dan bila perlu dengan memberikan teguran.

Dari uraian tentang cara-cara melakukan koordinasi diatas, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa cara-cara melakukan koordinasi secara lebih operasional dapat dilakukan dengan memberikan keterangan/informasi, instruksi, perintah lisan dan/atau tertulis, pertemuan formal dan informal, bimbingan/nasihat, pelatihan dan bila dipandang perlu dengan teguran.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pada pelaksanaan koordinasi horizontal dalam penyelenggaraan TMMD dengan metode kualitatif. Langkah-langkah penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1. Studi Pendahuluan, studi pendahuluan ini dimaksudkan untuk menjajaki keadaan di lapangan guna mendapatkan masalah apa yang layak dan penting untuk diteliti.
2. Pembuatan Desain Penelitian, desain penelitian memuat tentang penetapan judul penelitian, identifikasi permasalahan, menetapkan focus penelitian, melakukan studi pustaka serta merumuskan asumsi dan hipotesis.
3. Seminar Pradesain, seminar pradesain dilakukan untuk mendapatkan umpan balik terhadap hal-hal yang perlu mendapat perbaikan.
4. Turun di Lapangan, turun di lapangan adalah memilih lokasi situasi sosial meliputi tempat, responden dan kegiatannya.
5. Pengumpulan Data, pengumpulan data sebagai bahan analisa penelitian untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan dalam penelitian.
6. Analisa Data, analisa data dilakukan segera setelah data-data diperoleh dan dituangkan dalam bentuk laporan.

Tempat penelitian berlokasi di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan TMMD oleh Kodim 1207/Pk dengan dukungan dana dari APBD Kota Pontianak, yang dalam proses koordinasinya belum dilaksanakan secara optimal.
2. Kelurahan Bangka Belitung Darat berada di perkotaan dengan jumlah penduduk yang cukup padat namun belum didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai dan sering terjadi banjir.

Subyek penelitian merupakan responden atau sumber data dalam melakukan wawancara mencakup aparat TNI dan Polri yang terlibat dalam kegiatan TMMD serta aparat Pemerintah Kota Pontianak. Penentuan sumber data dilakukan secara purposive, yaitu sumber data yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu saja. (Sugiyono, 2012:216). Adapun orang-orang yang akan dijadikan sebagai responden adalah:

1. Pimpinan Kodim 1207/Ptk : Komandan Kodim 1207/Ptk.
2. Staf Pelaksana TMMD :
 - a. Perwira Seksi Teritorial Kodim 1207/Ptk.
 - b. Komandan Koramil 03-1207/Ptk Brl.
 - c. Babinsa Kelurahan Bangka Belitung Darat.
3. Staf Unsur Pendukung TMMD :
 - a. Dan Denkay-2/BC.
 - b. Pa Laksa Lanal Ptk.
 - c. Kadis Ops Lanud Spd.
 - d. Kabag Ops Polresta Ptk.
4. Aparat Pemerintah Kota Pontianak
 - a. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
 - b. Kasi Pemerintahan Kelurahan Bangka Belitung Darat.
 - c. Ketua RT 004 dan Ketua RW 005 Kelurahan Bangka Belitung Darat.

Obyek penelitian mencakup tentang pelaksanaan koordinasi horizontal antara Kodim 1207/Ptk dengan satuan TNI dan Polri yang terlibat dalam kegiatan TMMD serta aparat Pemerintah Kota Pontianak.

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

1. Peneliti sendiri yang bertindak sebagai instrumen peneliti dan sudah divalidasi oleh peneliti sendiri melalui evaluasi diri tentang pemahaman terhadap metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan bidang yang akan diteliti, kesiapan akademik dan logistik untuk terjun lapangan.
2. Buku catatan, alat perekam suara dan camera sebagai alat pendukung dalam pengumpulan data.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

1. Teknik Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab terhadap responden secara langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Teknik Dokumen, yaitu dengan menghimpun data dan informasi dari foto-foto kegiatan TMMD, rekaman suara saat wawancara, buku rencana dan laporan pelaksanaan TMMD serta buku petunjuk penyelenggaraan TMMD.

Untuk teknik analisa data mengacu pada pendapat Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012:246) dimana dalam melakukan analisis data menggunakan langkah-langkah:

1. Reduksi Data, yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada

hal yang penting, mencari tema dan polanya, guna mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data, yaitu dengan menyajikan semua data dan informasi yang telah disusun dan diklasifikasi dalam bentuk tulisan atau narasi, guna memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, kemudian merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dialami.
3. Kesimpulan, yaitu dengan membuat kesimpulan yang relevan dari data-data yang sudah disajikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Koordinasi Pada Tahap Perencanaan TMMD

Tahap perencanaan dalam kegiatan TMMD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan secara optimal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan TMMD. Tahap perencanaan ini sudah harus dimulai 2 tahun sebelum pelaksanaan TMMD sampai dengan Triwulan III sebelum tahun dilaksanakannya kegiatan TMMD. Kegiatan yang paling awal dalam tahap perencanaan ini adalah menentukan Obyek TMMD yaitu berupa sasaran fisik dan non fisik di salah satu wilayah Kecamatan/Kelurahan yang sudah ditentukan sebelumnya sesuai kalender kegiatan TMMD Kodim 1207/Ptk.

Sesuai Rencana Umum TMMD Tahun 2012 yang disusun oleh Penanggung Jawab Operasional (2011:12) diuraikan bahwa dalam proses perencanaan, pemilihan dan penentuan sasaran fisik TMMD menggunakan pola "*Bottom Up Planning*" yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu dari semua unsur yang terkait mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai dengan tingkat Pemerintah Daerah dan ditindaklanjuti dengan pola "*Top Down*" berupa perintah, instruksi maupun petunjuk dari tingkat pusat secara hierarki mulai dari PJJ, PJO, PKO sampai PKP.

Hasil wawancara penulis dengan Perwira Seksi Teritorial Kodim 1207/Ptk selaku Staf TMMD terkait dengan perencanaan TMMD diperoleh keterangan bahwa:

Setelah mendapat perintah/instruksi/petunjuk dari Komandan Kodim 1207/Ptk, maka proses perencanaan TMMD mulai dilaksanakan khususnya dalam penentuan sasaran fisik dengan melakukan koordinasi secara terpadu mulai dari tingkat bawah yaitu dengan Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara sampai dengan unsur-unsur Pemerintah Kota Pontianak seperti Staf BP2KB, Staf Dinas Kesehatan dan Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Namun penentuan daerah sasaran TMMD di wilayah Kelurahan Bangka Belitung Darat ini tidak bisa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan seperti: daerah kritis/rawan bencana

alam, daerah terpencil/terisolir, daerah miskin/terbelakang dan daerah rawan dari segi stabilitas keamanan. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan TMMD sudah ditentukan sebelumnya yaitu sebesar Rp. Rp 400.000.000,00, sehingga pencairan sasaran TMMD perlu disesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada, yaitu dengan mencari lokasi yang tidak terlalu jauh dari kota dan mudah terjangkau guna menghemat biaya dari pergeseran personel dan materiil, sehingga anggaran dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan fisik. Adapun lokasi TMMD yang dipilih adalah di Jl. Disbun 1 Kelurahan Bangka Belitung Darat dengan susunan kegiatan fisik berupa pembangunan rabat beton sepanjang 500 m dengan lebar 3 m dan tinggi 15 cm serta perehaban masjid Nurul Iman. Adapun anggaran untuk mendukung kegiatan TMMD terlambat diserahkan ke Kodim 1207/Ptk, baru diserahkan satu minggu setelah TMMD berjalan sehingga menghambat dalam penyelenggaraan TMMD terutama guna mendukung biaya administrasi, logistik dan pembelian bahan materiil.

Pelajaran yang dapat dipetik dari hasil wawancara diatas adalah bahwa dalam merencanakan suatu kegiatan harus dilakukan koordinasi secara intensif dan terpadu terhadap semua pihak yang akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Koordinasi dapat dilakukan melalui pemberian instruksi, perintah dan/atau petunjuk.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris BPKAD berkaitan dengan proses pengalokasian anggaran TMMD didapat keterangan bahwa :

Memang benar alokasi anggaran TMMD sudah ditetapkan dalam kurun 5 tahun terakhir sebesar Rp 400.000.000,00, dengan rincian untuk anggaran operasional sebesar Rp 100.000.000,00 dan untuk anggaran belanja barang sebesar Rp 300.000.000,00. Hal ini merupakan kebijakan Walikota Pontianak atas persetujuan DPRD Kota Pontianak. Namun sesuai permohonan dari Dandim 1207/Ptk kepada Walikota Pontianak untuk penambihan anggaran TMMD tahun 2013 maka direncanakan pada tahun 2013 dukungan anggaran TMMD akan dinaikkan menjadi Rp. 500.000.000,00. Sedangkan keterlambatan pencairan anggaran TMMD maslasi menurut Sekretaris BPKAD disebabkan karena adanya administrasi yang belum ditandatangani oleh Walikota Pontianak, dimana pada saat itu Walikota Pontianak sedang melaksanakan dinas ke Jakarta sehingga pencairan anggaran baru bisa dilaksanakan setelah Walikota Pontianak kembali dari Jakarta.

Pelajaran yang dapat dipetik dari hasil wawancara diatas adalah bahwa dalam suatu organisasi perlu adanya penyamaan persepsi diantara unsur-unsur dalam organisasi tersebut terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Mandrawan Suseno

Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura

Kegiatan lain yang tidak kalah penting pada Tahap Perencanaan TMMD ini adalah penetapan subyek TMMD yaitu satuan-satuan dari TNI dan Polri serta unsur-unsur dari Pemerintah Kota Pontianak dan Ormas yang akan dilibatkan dalam kegiatan TMMD yang nantinya akan dibentuk dalam organisasi TMMD sebagai Satuan Tugas (Satgas) TMMD yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan TMMD di lapangan baik dalam kegiatan fisik maupun non fisik.

Hasil wawancara peneliti dengan Komandan Kodim 1207/Ptk berkaitan dengan perencanaan awal TMMD didapat keterangan bahwa :

Penetapan subyek TMMD maupun sarana yang akan digunakan dalam mendukung kegiatan TMMD perlu dilakukan seawal mungkin setelah ditetapkannya obyek yang akan menjadi sasaran TMMD, hal ini dimaksudkan agar satuan-satuan TNI dan Polri serta unsur-unsur dari Pemerintah Kota Pontianak dan Ormas yang akan dilibatkan dalam kegiatan TMMD dapat menyiapkan personelya sedini mungkin sehingga personel yang nantinya dikirim adalah personel yang berkualitas sesuai dengan tugas dan tanggung-jawabnya serta memiliki disiplin dan mental yang baik. Rencana awal kegiatan TMMD ini telah disampaikan melalui rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) yang dihadiri oleh Walikota Pontianak, Ketua DPRD Kota Pontianak, Kapolres Pontianak, Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak ditambah Danlanal Pontianak dan Danlanud Supado dengan harapan segera ditindak lanjuti dengan penyiapan personel, materiil dan sarana yang diperlukan sesuai bidang tugasnya masing-masing, seperti nampak pada gambar dibawah ini :



Pelajaran yang dapat dipetik dari hasil wawancara diatas adalah bahwa koordinasi dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain dengan melalui pertemuan atau rapat koordinasi.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Palaksa Lanal Pontianak berkaitan dengan perencanaan awal TMMD didapat keterangan bahwa :

Pemberitahuan awal tentang akan adanya kegiatan TMMD sudah disampaikan oleh Komandan Kodim 1207/Ptk maupun oleh Perwira Seksi Teritorial Kodim 1207/Ptk secara lisan

menyangkut tentang pengeralan personel, sasaran-sasaran, waktu dan lokasi TMMD melalui forum resmi pada saat rapat dengan pimpinan daerah maupun saat bertemu dalam forum-forum tidak resmi.

Pelajaran yang dapat dipetik dari hasil wawancara diatas adalah bahwa koordinasi dapat dilakukan melalui forum-forum resmi seperti rapat atau pertemuan maupun melalui forum-forum tidak resmi seperti saat menghadiri undangan, saat kegiatan olahraga dll.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa responden yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa proses koordinasi dalam tahap perencanaan TMMD sudah dilaksanakan sesuai dengan cara-cara melakukan koordinasi menurut Manulang (2009:12) antara lain dengan memberikan instruksi, perintah, bimbingan, pertemuan dan rapat koordinasi. Namun demikian koordinasi yang sudah dilaksanakan tidak ditindaklanjuti dengan koordinasi secara intensif antara Staf TMMD dengan unsur Pemerintah Kota Pontianak sehingga muncul permasalahan yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan TMMD antara lain dalam hal dukungan anggaran yang terlambat cairkan serta jumlah anggaran yang sudah ditetapkan dan tidak ada penambahan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan belum adanya persepsi yang sama antara Kodim 1207/Ptk sebagai penyelenggara TMMD dengan Pemerintah Kota Pontianak sebagai penyedia anggaran khususnya tentang tujuan dan sasaran diselenggarakannya TMMD yaitu untuk membantu Pemerintah Kota Pontianak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan baik fisik maupun non fisik yang hasilnya langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini tentunya belum mempedomani teori yang dikemukakan oleh Hasibuan (2011:87) tentang tujuan dilaksanakannya koordinasi dalam suatu organisasi khususnya yang terkait dengan permasalahan di atas antara lain:

- a. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran organisasi.
- b. Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsur-unsur manajemen yang mencakup Man, Money, Material, Machines, Methods and Market (6 M) ke arah tercapainya sasaran organisasi.

Koordinasi yang sudah dilakukan pada tahap perencanaan TMMD tidak boleh terputus dan harus ditindaklanjuti dengan koordinasi secara intensif dan terpadu pada tahapan TMMD selanjutnya yaitu tahap persiapan TMMD.

2. Koordinasi Pada Tahap Persiapan TMMD

Tahap persiapan kegiatan TMMD merupakan tahap lanjutan dari tahap perencanaan, yang dilaksanakan 1 bulan sebelum pelaksanaan TMMD. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan

Mandrawan Suseno

Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura

TMMD ini menurut Buku Petunjuk Teknik tentang Bhakti TNI (2004:19-24) antara lain:

- a. Melaksanakan Rakornis TMMD tingkat pusat yang diikuti oleh para Dandim dan instansi terkait lainnya.
- b. Menyiapkan administrasi TMMD mencakup buku Rencana kegiatan TMMD, Perintah Operasi TMMD, Rencana Upacara Pembukaan TMMD dan Perencanaan Dukungan Logistik.
- c. Menyiapkan personel TNI, Polri, unsur Pemerintah Kota Pontianak, Ormas dan masyarakat yang akan dilibatkan dalam kegiatan TMMD.
- d. Menyiapkan sarana TMMD.

Adapun dari kegiatan di atas yang paling menonjol dan memerlukan koordinasi secara terpadu dan berkelanjutan adalah dalam penyiapan administrasi TMMD dan penyiapan personel yang akan dilibatkan untuk mendukung kegiatan TMMD.

Hasil wawancara peneliti dengan Perwira Seksi Teritorial Kodim 1207/Ptk berkaitan dengan penyiapan administrasi TMMD diperoleh keterangan bahwa :

Setelah didapat kepastian tentang lokasi, sasaran dan alokasi dukungan anggaran TMMD, dilanjutkan dengan penyiapan administrasi TMMD diantaranya membuat surat permohonan dukungan anggaran dan dukungan personel, buku Rencana Kegiatan TMMD dan Perintah Operasi TMMD, kemudian didistribusikan kepada Forkopinda, para Dandim TNI dan Polri, instansi Pemerintah Kota Pontianak serta unsur-unsur lain yang terkait dengan kegiatan TMMD. Selama dalam penyusunan Rencana Kegiatan TMMD dan Perintah Operasi TMMD tetap dilakukan koordinasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan TMMD, karena pada saat yang bersamaan unsur-unsur lain juga membuat rencana sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, seperti nampak pada gambar dibawah ini :



Pelajaran yang dapat dipetik dari hasil wawancara diatas adalah bahwa dalam melakukan koordinasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang bersifat instruksi, perintah, pemberitahuan atau permohonan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Komandan Kodim 1207/Ptk berkaitan dengan kriteria personel yang akan dilibatkan dalam mendukung kegiatan TMMD diperoleh keterangan bahwa :

Kegiatan TMMD merupakan salah satu bentuk kegiatan Operasi Bhakti TNI yang dilaksanakan atas perintah Panglima TNI melalui Kasud. Mengingat kegiatan TMMD ini bersifat operasi maka dalam pelaksanaannya dibatasi oleh waktu yaitu selama 21 hari dengan sasaran yang jelas dan terukur tingkat keberhasilannya. Untuk itu personel yang dilibatkan dalam kegiatan TMMD baik kegiatan fisik maupun non fisik harus personel yang sudah terlatih, berpengalaman dan menguasai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Dalam menyiapkan personel ini Kodim 1207/Pk sudah mengirimkan surat permohonan kepada para Komandan Satuan TNI, Polri dan instansi terkait di Pemerintahan Kota Pontianak disertai dengan kriteria, kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan. Namun dalam kenyataannya personel yang dikirimkan khususnya dari satuan TNI yang akan melaksanakan kegiatan fisik adalah personel yang baru masuk di satuanya sehingga belum memiliki pengalaman dalam melaksanakan kegiatan TMMD.

Pelajaran yang dapat dipetik dari hasil wawancara diatas adalah bahwa koordinasi tidak boleh terputus dan harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan sampai dengan hal-hal yang bersifat teknis agar tidak timbul perbedaan persepsi terhadap tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Sementara itu hasil wawancara dengan Dan Denkav-2/BC dan Kadisops Lanud Supadio berkaitan dengan pengerahan personel yang dilibatkan dalam mendukung kegiatan TMMD diperoleh keterangan yang relatif sama, yaitu bahwa

Pada saat dilaksanakan kegiatan TMMD, satuan Denkav-2/BC dan Lanud Supadio juga sedang melaksanakan program latihan dan tugas-tugas lain sehingga tidak dapat mendukung personel secara optimal dan sesuai permintaan dari Kodim 1207/Pk. Personel untuk mendukung kegiatan TMMD dikerahkan personel yang sebagian besar baru masuk satuan karena disamping mereka belum diikutkan dalam program latihan satuan, hal ini juga diharapkan dapat menjadi bekal pengalaman mereka di lapangan.

Pelajaran yang dapat dipetik dari hasil wawancara diatas adalah bahwa sebelum melaksanakan suatu kegiatan perlu adanya koordinasi untuk menyamakan persepsi diantara para unsur pimpinan terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Adapun hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kelurahan Bangka Belitung Darat terkait dengan peran Kelurahan dalam mendukung kegiatan TMMD diperoleh keterangan bahwa :

Babinsa Kelurahan Bangka Belitung Darat beberapa kali melakukan koordinasi dengan Lurah dan Kasi Pemerintahan Kelurahan Bangka Belitung Darat berkaitan dengan rencana akan dilaksanakannya kegiatan TMMD, meminta data monografi terbaru dan minta bantuan kepada kelurahan untuk menyampaikan kegiatan TMMD ini kepada warga

setempat serta minta bantuan untuk pengerahan warga guna mendukung kegiatan TMMD tersebut.

Pelajaran yang dapat dipetik dari hasil wawancara diatas adalah bahwa dalam mempersiapkan suatu kegiatan harus dilaksanakan koordinasi secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari pucuk pimpinan sampai dengan unsur pelaksana di tingkat bawah sesuai stratanya.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa responden yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi dalam Tahap Persiapan TMMD khususnya dalam penyiapan administrasi TMMD ini sudah dilakukan oleh Kodim 1207/Pk dengan unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan TMMD sehingga selama dalam tahap persiapan kegiatan TMMD ini tetap terjalin sinkronisasi dan keterpaduan dalam setiap pemikiran dan tindakan kearah tercapainya tujuan dan sasaran organisasi (Hasibuan, 2011:87).

Namun koordinasi dalam penyiapan personel untuk mendukung kegiatan TMMD belum dilaksanakan secara optimal, sehingga menyebabkan kualitas dan kuantitas personel yang dilibatkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, hal ini tentunya menjadi penghambat dalam pelaksanaan dilapangan. Kondisi ini menunjukkan telah terjadi penyimpangan terhadap tujuan dari organisasi TMMD antara lain dalam hal pengintegrasian terhadap tindakan dan pemanfaatan atas unsur-unsur dalam manajemen khususnya Sumber Daya Manusia untuk mendukung tercapainya sasaran organisasi (Hasibuan, 2011:87).

Koordinasi yang telah dilakukan pada tahap perencanaan TMMD dan tahap persiapan TMMD akan sangat menentukan dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan TMMD di lapangan, namun demikian koordinasi tetap harus dilaksanakan dalam tahapan TMMD selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan TMMD.

3. Koordinasi Pada Tahap Pelaksanaan TMMD

Tahap Pelaksanaan kegiatan TMMD merupakan tahapan yang paling menentukan dalam keberhasilan TMMD karena dalam tahapan ini akan terlihat secara nyata hasil dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lapangan, sehingga akan diketahui sejauh mana pencapaian dari sasaran TMMD. Pada Tahap Pelaksanaan kegiatan TMMD ini dilaksanakan selama 21 hari dimulai dari Upacara Pembukaan TMMD dengan Inspektur Upacara adalah Staf Ahli Pangdam XII/Tpr bidang Ekonomi dilanjutkan dengan pelaksanaan pekerjaan fisik dan non fisik dan pada hari ke 21 kegiatan TMMD dinyatakan selesai yang diakhiri dengan Upacara Penutupan, dengan Inspektur Upacara Wakil Walikota Pontianak dan dilaksanakan penyerahan hasil TMMD dari Komandan Kodim 1207/Pk kepada Wakil Walikota Pontianak. Pada Tahap Pelaksanaan kegiatan TMMD ini, kegiatan yang memerlukan koordinasi secara terpadu dan terus-menerus adalah pada saat

proses pengerjaan/pembangunan sasaran baik pada kegiatan fisik maupun non fisik. Hal ini dilakukan agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dengan lancar, aman dan tepat waktu sehingga tujuan dan sasaran TMMD dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan TMMD baik kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik perlu dikembangkan metode dan teknik tertentu, adapun metode dan teknik tersebut menurut Buku Rencana Umum TMMD (2012:12) dijelaskan sebagai berikut:

- Menerapkan pola kemandirian antar Institusi dalam memberdayakan masyarakat dan Desa/ Kelurahan dengan mengembangkan keterpaduan program lintas sektoral di daerah yang telah ditentukan.
- Menerapkan dan mengembangkan hubungan kekeluargaan, sikap saling asah, saling asih dan saling asuh serta gotong royong antar semua pihak yang terkait.
- Meningkatkan peranan dan partisipasi aktif masyarakat guna menggugah kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan sosial dan kegiatan pembangunan di daerahnya.
- Mengutamakan musyawarah dan tindakan pencegahan daripada penanggulangan dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada.

Hasil wawancara peneliti dengan Komandan Koramil 03-1207/Pontianak Barat selaku Komandan Satuan Setingkat Kompi (Dan SSK) TMMD berkaitan dengan hambatan dan upaya mengatasi selama kegiatan di lapangan diperoleh keterangan bahwa :

Dengan banyaknya personel yang masih baru dan belum berpengalaman dalam kegiatan TMMD pada awalnya cukup menghambat dan memperlambat dalam pelaksanaan kegiatan fisik sehingga disiasati dengan menambah jam kerja dan lembur, seperti nampak pada gambar dibawah ini :



Adapun peran serta masyarakat dalam kegiatan TMMD khususnya pada kegiatan pembangunan fisik dirasa sangat minim, kurang lebih hanya sekitar 10 - 15 orang, hal ini disebabkan karena rata-rata mereka sibuk bekerja. Untuk meningkatkan peran masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam membangun di daerahnya, mereka secara bergiliran diwajibkan untuk ikut bekerja melanjutkan pembangunan fisik pada

malam hari, yaitu mulai jam 19.30 wib sampai dengan jam 23.00 wib.

Pelajaran yang dapat dipetik dari hasil wawancara diatas adalah bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari suatu kegiatan dihadapkan dengan kendala-kendala yang ditemui, perlu dilakukan koordinasi secara terus-menerus diantara unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan tersebut selama proses dilapangan.

Adapun hasil wawancara dengan Kabagops Polresta Pontianak berkaitan dengan pengerahan personel Polri dalam mendukung kegiatan TMMD diperoleh keterangan bahwa :

Kegiatan TMMD merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk menjalin integrasi, komunikasi dan kebersamaan antara TNI dengan Polri bersama masyarakat untuk saling bahu membahu dalam membangun Kota Pontianak guna meningkatkan kesejahteraan dan keamanan. Namun demikian dalam kegiatan TMMD ini Polri hanya bisa mendukung kegiatan non fisik berupa penyuluhan Narkoba dan Kamtibmas, tidak dapat mengirimkan personel sesuai permohonan Kodim 1207/Pik untuk mendukung kegiatan fisik karena pada waktu yang bersamaan sedang sibuk dengan kegiatan pengamanan.

Pelajaran yang dapat dipetik dari hasil wawancara diatas adalah bahwa koordinasi sangat penting untuk menyamakan pemikiran dan tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran bersama, antara lain dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memenuhi kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan.

Sementara itu hasil wawancara peneliti dengan Ketua RT 004 dan Ketua RW 005 Kelurahan Bangka Belitung Darat terkait dengan kendala dalam pengerahan warga diperoleh keterangan bahwa :

Mereka cukup kesulitan dalam mengerahkan warganya terutama pada hari dan jam kerja guna mendukung kegiatan TMMD karena sebagian besar warganya sibuk bekerja mencari nafkah terutama pada pagi sampai sore, sehingga ada kesepakatan bersama bagi warga yang tidak dapat ikut berpartisipasi pada pagi/siang hari wajib ikut pada malam hari, seperti nampak pada gambar dibawah ini :



Sementara itu pengerahan warga baik laki-laki maupun wanita pada kegiatan non fisik tidak

mengalami hambatan karena dilaksanakan pada malam hari.

Pelajaran yang dapat dipetik dari hasil wawancara diatas adalah bahwa koordinasi di lapangan perlu dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dilapangan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara peneliti dengan Babinsa Kelurahan Bangka Belitang Darat terkait dengan penggerakan masyarakat untuk mendukung kegiatan TMMD diperoleh keterangan bahwa :

Sosialisasi tentang akan dilaksanakannya kegiatan TMMD sudah dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan TMMD, namun Babinsa juga menemui kesulitan dalam mengumpulkan warga di RT 004 dan RW 005 karena mereka sibuk bekerja sehingga sosialisasi dilaksanakan secara terbatas melalui Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Agama dan warga yang ada, dengan harapan mereka akan menyampaikan kepada warga yang lain. Dengan banyaknya warga yang bekerja, maka penggerakan warga untuk ikut TMMD menjadi terbatas khususnya untuk mendukung kegiatan fisik, seperti nampak pada gambar dibawah ini :



Pelajaran yang dapat dipetik dari hasil wawancara diatas adalah bahwa salah satu cara untuk melakukan koordinasi guna mendukung kesuksesan dan kelancaran suatu kegiatan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang terkait.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Komandan Kodim 1207/Ptk berkaitan dengan keikutsertaan Polri dan Ormas dalam mendukung kegiatan TMMD diperoleh keterangan bahwa :

Keikutsertaan unsur Polri dalam kegiatan TMMD sangat minim, tidak ada personel dari Polri yang ikut dalam kegiatan fisik, hanya ada 2 personel Polri yang ikut dalam kegiatan non fisik, padahal diharapkan dengan keikutsertaan personel Polri dalam kegiatan fisik akan semakin terjalin integrasi dan semangat kebersamaan antara TNI dengan Polri bersama masyarakat. Selain itu menurut Komandan Kodim 1207/Ptk sangat disayangkan tidak adanya keterlibatan dari Ormas khususnya dari FKPP dan PPM serta dari Mahasiswa dan Pelajar. Upaya dari Kodim 1207/Ptk sudah membuat surat permohonan

penggerakan personel untuk mendukung kegiatan TMMD, namun mereka tidak bisa memenuhi permintaan tersebut karena kesibukan masing-masing, mereka hanya bisa ikut dalam upacara pembukaan TMMD saja, seperti nampak pada gambar dibawah ini :



Pelajaran yang dapat dipetik dari hasil wawancara diatas adalah bahwa koordinasi dalam suatu organisasi sangat penting antara lain untuk mengintegrasikan kebutuhan sumber daya manusia guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Perwira Seksi Teritorial Kodim 1207/Ptk berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan non fisik diperoleh keterangan bahwa :

Kegiatan non fisik berupa penyuluhan-penyuluhan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan keikutsertaan warga cukup maksimal karena dilaksanakan pada malam hari, seperti nampak pada gambar dibawah ini :



Hanya pada saat penyuluhan KB dan Kesehatan oleh Penyuluh dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pontianak banyak warga yang menyayangkan karena hanya dilaksanakan penyuluhan saja seharusnya dilaksanakan juga pelayanan KB dan Kesehatan sehingga hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal ini sebenarnya sudah dikoordinasikan sebelumnya dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pontianak agar kegiatan penyuluhan dipadukan dengan kegiatan pelayanan KB dan Kesehatan, namun dengan alasan keterbatasan personel dan waktu sehingga hanya bisa memberikan penyuluhan saja.

Pelajaran yang dapat dipetik dari hasil wawancara diatas adalah bahwa untuk mendukung keberhasilan suatu kegiatan terkadang diperlukan koordinasi secara teknis yang dimulai dari di level

bawah guna menyerap aspirasi, saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat perencanaan suatu kegiatan.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa responden yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam tahap pelaksanaan TMMD sangat tergantung dari perencanaan dan persiapan yang dilakukan sebelumnya, khususnya dalam mengkoordinasikan setiap kegiatan harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan sampai dengan kegiatan yang dikoordinasikan tersebut selesai dilaksanakan. Permasalahan-permasalahan yang muncul selama dalam tahap pelaksanaan TMMD seperti pengerahan personel yang tidak memenuhi kriteria, minimnya keikutsertaan unsur Polri dan masyarakat, tidak adanya ormas dan mahasiswa/pelajar yang ikut serta tidak adanya pelayanan KB dan Kesehatan disebabkan karena kurang optimalnya koordinasi pada proses perencanaan dan persiapan yang menimbulkan kurangnya persepsi yang sama akan pemikiran dan tindakan serta kurangnya integrasi antar unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan TMMD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam organisasi TMMD (Hasibuan, 2011:87).

Seperti halnya pada tahap perencanaan, tahap persiapan dan tahap pelaksanaan TMMD, maka koordinasi secara terpadu dan berkelanjutan tetap harus dilakukan selama dalam tahap purna manunggal TMMD.

4. Koordinasi Pada Tahap Purna Manunggal TMMD

Tahap Purna Manunggal kegiatan TMMD dilaksanakan minimal dalam jangka 1 tahun, dimulai setelah kegiatan TMMD dinyatakan selesai dan hasilnya telah diserahkan kepada Pemerintah daerah sampai dengan masa pemeliharaan dan pengembangan/peningkatan terhadap hasil TMMD. Pada Tahap Purna Manunggal TMMD ini, sesuai Buku Petunjuk Teknik Bhakti TNI (2004:28-29) terdapat 3 kegiatan pokok yang perlu dilaksanakan yaitu:

- a. Membuat laporan hasil pelaksanaan TMMD sebagai pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Walikota Pontianak dan pimpinan TNI AD.
- b. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan TMMD mulai dari tahap perencanaan, tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- c. Mengadakan pemeliharaan terhadap hasil pelaksanaan TMMD dan mengembangkan secara berkesinambungan.

Hasil wawancara peneliti dengan Perwira Seksi Teritorial Kodim 1207/Ptk tentang penyelenggaraan TMMD dan kendala-kendala yang dihadapi selama dalam pelaksanaan TMMD diperoleh keterangan bahwa :

Kegiatan TMMD secara keseluruhan telah dilaksanakan sesuai rencana, dengan lancar dan aman. Kendala-kendala yang ditemui di lapangan seperti keterlambatan pencairan dana, kesulitan dalam pengerahan masyarakat karena mereka harus bekerja dan kondisi cuaca dengan curah hujan yang tidak menentu masih dapat diatasi berkat kerjasama dan koordinasi antar unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan TMMD bersama masyarakat setempat, sehingga pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu dan mencapai sasaran fisik sesuai yang telah ditetapkan. Masih menurut Perwira Seksi Teritorial Kodim 1207/Ptk, kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan TMMD telah dilakukan mulai tahap perencanaan, persiapan dan pelaksanaan, dengan meminta laporan dan masukan dari personel yang terlibat TMMD dan masyarakat sebagai bahan masukan untuk perbaikan pada program TMMD berikutnya.

Pelajaran yang dapat dipetik dari hasil wawancara diatas adalah bahwa dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang melibatkan lintas instansi perlu dilakukan koordinasi secara terpadu dan berkelanjutan sampai dengan kegiatan tersebut dinyatakan selesai secara tuntas.

Kegiatan yang sering terlewatkan dalam Tahap Purna Manunggal TMMD di beberapa daerah adalah kegiatan pemeliharaan terhadap hasil TMMD. Kegiatan ini sangat penting demi menjaga kelangsungan hasil TMMD sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat secara maksimal dalam jangka waktu yang lama. Menurut Buku Petunjuk Teknik tentang Bhakti TNI (2004:29), dalam pemeliharaan hasil TMMD dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pemeliharaan hasil-hasil TMMD sehingga dapat dirasakan dan dinikmati serta dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. Sebagai bagian dari Pembinaan Teritorial, maka Kodim menghimbau Pemerintah Daerah untuk melakukan peningkatan kualitas hasil TMMD yang memiliki nilai taktis seperti peningkatan jalan hasil TMMD dari kelas III menjadi kelas II atau kelas I.

Dari wawancara peneliti dengan Komandan Kodim 1207/Ptk berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan hasil TMMD diperoleh keterangan bahwa :

Kodim 1207/Ptk sudah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Pontianak agar mengulokasikan anggaran dalam kegiatan pemeliharaan TMMD, namun sampai dengan saat ini belum ada realisasinya. Langkah yang telah dilakukan oleh Kodim 1207/Ptk adalah memrintahkan Koramil dan Babinsa untuk mengadakan pemeliharaan hasil TMMD melalui kegiatan Karya Bhakti bersama-sama warga setempat sesuai kemampuan yang ada.

Pelajaran yang dapat dipetik dari hasil wawancara diatas adalah bahwa dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi diperlukan inovasi dan kreatifitas serta koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

Adapun hasil wawancara dengan Sekretaris BPKAD Pemerintah Kota Pontianak tentang alokasi anggaran pemeliharaan TMMD diperoleh keterangan bahwa :

Pemerintah Kota Pontianak pada setiap tahun telah menganggarkan program kegiatan TMMD melalui APBD Kota Pontianak kepada Kodim 1207/Ptk. Anggaran tersebut hanya diperuntukkan untuk sekali kegiatan TMMD, sementara itu untuk kegiatan pemeliharaan TMMD tidak didukung alokasi anggaran. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan dari wilayah lain yang tidak mendapat program pembangunan serta untuk pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah lainnya. Adapun untuk program peningkatan kualitas jalan diprioritaskan sesuai dengan sejauh mana tingkat pemanfaatan jalan tersebut bagi kepentingan umum dan perekonomian.

Pelajaran yang dapat dipetik dari hasil wawancara diatas adalah bahwa dalam suatu organisasi yang merupakan bentukan dari beberapa instansi seperti Satgas TMMD perlu adanya kesamaan pemikiran, langkah dan tindakan terhadap tujuan dan sasaran yang akan dicapai dihadapkan dengan aturan atau kebijakan dari masing-masing instansi.

Sedangkan hasil wawancara dengan Pasi Ops Denkav-2/BC berkaitan dengan manfaat dari keikutsertaan dalam kegiatan TMMD serta kendala-kendala dilapangan diperoleh keterangan bahwa :

Banyak manfaat yang dapat diambil oleh anggota Denkav-2/BC selama dalam mengikuti kegiatan TMMD di Kelurahan Bangka Belitung Darat, dimana para unsur pimpinan dapat mempraktekan secara langsung kepemimpinannya di lapangan sedangkan bagi anggota kegiatan ini sebagai wahana untuk pembelajaran dan memberikan bekal pengalaman dalam mengimplementasikan kegiatan Pembinaan Teritorial, seperti nampak pada gambar dibawah ini :



Adapun kendala yang ditemui dilapangan pada awal kegiatan anggota masih bingung dengan pekerjaan yang harus dilakukan, namun melalui

bimbingan dan arahan dari pimpinan penjelasan dari anggota lain yang sudah berpengalaman kendala tersebut dapat diatasi sehingga pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya dapat diselesaikan dengan baik.

Pelajaran yang dapat dipetik dari hasil wawancara diatas adalah bahwa selama dalam melakukan kegiatan dilapangan koordinasi tetap harus dilakukan oleh setiap individu untuk mengeliminir kekurangan-kekurangan yang ada, dapat dilakukan dengan cara pemberian penjelasan, bimbingan atau arahan.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa responden yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa pada Tahap Purna Manunggal TMMD ini koordinasi antara Kodim 1207/Ptk dengan Pemerintah Kota Pontianak belum berjalan secara terpadu dan berkesinambungan utamanya dalam kegiatan pemeliharaan terhadap hasil TMMD, yang mana kegiatan ini adalah merupakan bagian dari kegiatan TMMD secara keseluruhan. Hal ini terlihat dengan belum adanya persepsi yang sama akan pemikiran dan tindakan dari Pemerintah Kota Pontianak terhadap tujuan dan sasaran kegiatan TMMD (Hasibuan,2011:87).

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan pengumpulan data-data maupun informasi terhadap beberapa responden serta setelah melalui analisa dan pembahasan seperti yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama. Pada Tahap Perencanaan kegiatan TMMD sudah dilaksanakan koordinasi antar pimpinan dari satuan TNI, Polri, instansi Pemerintah Kota Pontianak dan Ormas yang akan dilibatkan dalam mendukung kegiatan TMMD melalui pertemuan dan rapat koordinasi, namun belum ditindaklanjuti dengan koordinasi secara teknis antar Staf yang terkait dengan kegiatan TMMD sehingga muncul ketidaksepahaman terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan TMMD berkaitan dengan penyiapan personel oleh satuan TNI, Polri dan Ormas serta perencanaan anggaran oleh Pemerintah Kota Pontianak. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi secara terpadu dan berkelanjutan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis antara staf Kodim 1207/Ptk dengan staf dari instansi yang akan dilibatkan dalam kegiatan TMMD.

Kedua. Pada Tahap Persiapan kegiatan TMMD sudah dilaksanakan koordinasi antara Komandan Kodim 1207/Ptk dengan Komandan Satuan TNI dan Polri serta pimpinan Ormas yang akan dilibatkan dalam kegiatan TMMD melalui rapat koordinasi dan surat permohonan personel, namun karena kurangnya komitmen dan persepsi yang sama terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan TMMD dari para Komandan Satuan TNI

dan Polri serta pimpinan Ormas menyebabkan pengerahan personel tidak memenuhi segi kualitas dan kuantitas. Oleh karena itu perlu adanya komitmen dan persepsi yang sama antara para pimpinan satuan TNI dan Polri serta para pimpinan dilingkungan instansi Pemerintah Kota Pontianak dan pimpinan Ormas yang terlibat dalam kegiatan TMMD tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan TMMD secara keseluruhan, utamanya dalam pengerahan personel yang memenuhi segi kualitas dan kuantitas serta pengalokasian dukungan anggaran TMMD.

Ketiga, Pada Tahap Pelaksanaan kegiatan TMMD sudah dilakukan koordinasi dilapangan antara Komandan Koramil selaku Komandan SSK TMMD dengan Komandan Peleton/Regu TMMD yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pembangunan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran dan waktu yang telah ditentukan, namun koordinasi antara Babinsa dengan Lurah, Ketua RW 005, Ketua RT 004 dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bangka Belitung Darat belum dilakukan secara optimal sehingga pengerahan masyarakat menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi secara terpadu dan berkelanjutan agar masyarakat dapat dikerahkan semaksimal mungkin dalam kegiatan TMMD guna menumbuhkan semangat gotong-royong dan kepedulian dalam membangun daerahnya.

Keempat, Pada Tahap Purna Manunggal kegiatan TMMD belum dilaksanakan koordinasi secara optimal antara Kodim 1207/Ptk dengan Pemerintah Kota Pontianak utamanya dalam penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan terhadap hasil TMMD, yang disebabkan karena belum adanya komitmen dan persepsi yang sama tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan TMMD secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi secara terpadu dan berkelanjutan antara Kodim 1207/Ptk dengan Pemerintah Kota Pontianak agar kegiatan pemeliharaan terhadap hasil TMMD dianggarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak minimal dalam jangka waktu satu tahun.

REFERENSI

- Amirullah dan Haris Budiyono. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Athoillah, Anton. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Handoko, Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Melayu. 2011. *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mamillang. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta Gadjah Mada University Press.
- Kodim 1207/Ptk. 2012. *Rencana Kegiatan TMMD Imbangan ke 88 TA.2012*. Pontianak : Komando Saigas TMMD.
- Kepala Staf Angkatan Darat. 2012. *Surat Telegram Rahasia Kasad selaku PJO TMMD ke 88 TA.2012 No: STR/02/2012*. Jakarta: Mabesad.
- Plunkett, Warren R. 2005. *Management: Meeting and Exceeding Customer Expectations*. 8edition, Thomson South-Western Co, USA.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Kuriawan Saefullah. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Kencana.
- Syaifit, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Staf Umum Teritorial Angkatan Darat. 2012. *Materi Sosialisasi Sebagai Panduan Penyelenggaraan Program TMMD TA. 2012*. Jakarta : Mabesad.
- Staf Umum Teritorial Angkatan Darat. 2002. *Pedoman Penyelenggaraan TMMD*. Jakarta: Mabesad.
- Tentara Nasional Indonesia 2007. *Doktrin Tentara Nasional Indonesia. Tri Dharma Eka Karma*. Jakarta: Mabes TNI.
- Tentam Nasional Indonesia Angkatan Darat. 2007. *Naskah Sementara Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi*. Jakarta: Mabesad.
- Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Press.
- Uttriansa, Djati dan John Suprihanto. 2001. *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : BPFE.
- Walikota Pontianak. 2012. *Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Tim TMMD Imbangan ke 88 Tahun 2012 Kodim 1207/Ptk TA. 2012*. Pontianak: Pemerintah Kota Pontianak.